DPMPD
PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR

PAPARAN KEPALA DPMPD

KEBIJAKAN PEMERINTAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa

Rapat Teknis Pengelolaan Keuangan Desa
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026

SITI SUGIYANTI, S.E., M.Si
KEPALA DPMPD PROV.KALTIM

18 NOVEMBER 2026 | SAMARINDA

DPMPD
PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR

KONTEKS DAN ARAH KEBIJAKAN

Keuangan desa harus berdampak, *bukan sekadar terserap*

Fokus: kualitas belanja • kepatuhan tata kelola • manfaat nyata bagi masyarakat desa

1 BELANJA TEPAT SASARAN

APB Desa menjawab kebutuhan dan prioritas masyarakat serta mendukung pembangunan desa yang inklusi.



2 TERTIB DAN AKUNTABEL

Setiap tahapan dikelola transparan, partisipatif, disiplin anggaran, dan dapat dipertanggung-jawabkan.



3 CEGAH SEJAK AWAL

Pembinaan dan pengendalian berkelanjutan untuk mencegah risiko, kesalahan administrasi, dan penyimpangan.



KUALITAS = PROSES YANG BENAR + HASIL YANG DIRASAKAN WARGA

DPMPD
PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR

MANDAT PEMERINTAH PROVINSI

Provinsi membina kabupaten/kota dan memperkuat ekosistem desa



PASAL 114

Fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Bukan mengambil alih kewenangan kabupaten/kota; provinsi memperkuat kapasitas, koordinasi, dan kualitas tata kelola.

RUANG GERAK STRATEGIS PEMERINTAH PROVINSI

1	**Pembinaan regulasi**	Membina kabupaten/kota dalam penyusunan regulasi dan kebijakan yang mengatur desa.
2	**Penguatan kapasitas**	Meningkatkan kapasitas kepala desa, perangkat desa, dan BPD.
3	**Manajemen pemerintahan**	Membina manajemen pemerintahan desa serta memfasilitasi pendampingan dan teknis.
4	**Bimbingan teknis**	Memberikan bimbingan teknis bidang tertentu yang belum dapat dilaksanakan kabupaten/kota.
5	**Pembiayaan desa**	Membina dan mengawasi aspek pembiayaan desa dalam APBD kabupaten/kota.

Landasan: UU 6/2014 Pasal 112 dan 114; UU 3/2024

DPMPD
PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR

KERANGKA PENGELOLAAN

Kawal seluruh siklus pengelolaan keuangan desa

Pendampingan harus hadir dari hulu sampai hilir — bukan hanya saat penyusunan APB Desa.

1 PERENCANAAN



- RPJM Desa · RKP Desa
- Musyawarah dan prioritas

2 PENGANGGARAN



- Rancangan APB Desa
- Evaluasi dan penetapan

3 PELAKSANAAN



- Transaksi sesuai anggaran
- Pengadaan dan bukti

4 PENATAUSAHAAN



- Pencatatan tertib
- Rekonsiliasi berkala

5 PELAPORAN



- Laporan realisasi
- Informasi kepada warga

6 PERTANGGUNGJAWABAN



- Laporan akhir tahun
- Tindak lanjut evaluasi

PRINSIP: transparan • partisipatif • tertib • efisien • taat regulasi • akuntabel

DPMPD
PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR

STRATEGI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Lima pengungkit kebijakan DPMPD Provinsi Kaltim

Menguatkan kapasitas dan keseragaman kualitas tata kelola di seluruh kabupaten/kota

1 SINKRONISASI KEBIJAKAN



Penyelarasan regulasi, pedoman teknis, dan kebijakan kabupaten/kota.

2 PENINGKATAN KAPASITAS



Bimtek dan klinik konsultasi bagi DPMD/K, kecamatan, aparatur desa, dan operator.

3 PENDAMPINGAN TEKNIS



Fasilitasi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, dan penyelesaian kendala.

4 MONITORING BERBASIS RISIKO



Pemetaan isu, identifikasi desa berisiko, pemantauan tindak lanjut, dan eskalasi masalah.

5 KOLABORASI PENGAWASAN



Sinergi dengan Inspektorat, BPKP, aparat penegak hukum, kecamatan, dan BPD sesuai kewenangan.

DPMPD
PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR

SINERGI LINTAS TINGKATAN

Pengawasan efektif membutuhkan peran yang jelas

Setiap unsur bekerja sesuai kewenangan; hasil pembinaan dan pengawasan harus ditindaklanjuti

KABUPATEN/KOTA

- Pembinaan langsung pemerintah desa.
- Evaluasi regulasi/APB Desa.
- Pengawasan keuangan.



KECAMATAN

- Fasilitasi dan pembinaan desa.
- Pemantauan penyelenggaraan pemerintahan desa.



INSPEKTORAT / APIP

- Pengawasan intern berbasis risiko.
- Audit/reviu/evaluasi.
- Pantau tindak lanjut.



PROVINSI

- Arah kebijakan dan pembinaan kabupaten/kota.
- Fasilitasi teknis.
- Koordinasi.
- Pemantauan.





PEMERINTAH DESA & BPD

- Pengelolaan dan pengawasan internal sesuai peran.
- Transparansi, partisipasi, kontrol masyarakat.



SATU TUJUAN: pengelolaan keuangan desa yang tertib, efektif, transparan, dan berdampak.

DPMPD
PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR

DATA PENYALURAN DANA DESA

Potret Penyaluran Dana Desa Provinsi Kalimantan Timur

Rekapitulasi 7 kabupaten/kota • berdasarkan tabel yang disampaikan

No	ID Prov	Provinsi	ID Kab	Kabupaten/Kota	Σ Desa	Jml Desa Mandiri	Pagu Dana Desa Reguler	Penyaluran dari RKUN ke RKD		Desa yang mendapatkan Pagu KDMP	Jumlah Desa yang mendapatkan Insentif Desa	Jumlah Desa Salur Dana Desa			Progress Salur terhadap Jumlah Desa Tahap I	Progress Salur terhadap Jumlah Desa Tahap II	Jumlah Desa Belum Salur Tahap II
								Total Salur				Dana Desa yang ditentukan penggunaannya		Insentif Desa			
								Nominal	%			Tahap I	Tahap II				
1	64	KALIMANTAN TIMUR	6401	PASER	139	63	43,531,118,000	43,530,235,099	100.00%	-	-	139	139	-	100.00%	100.00%	-
2	64	KALIMANTAN TIMUR	6402	KUTAI KARTANEGARA	193	92	63,386,966,000	62,096,831,400	97.96%	-	-	193	186	-	100.00%	96.37%	7
3	64	KALIMANTAN TIMUR	6403	BERAU	100	22	32,511,615,000	30,779,367,600	94.67%	-	-	100	92	-	100.00%	92.00%	8
4	64	KALIMANTAN TIMUR	6407	KUTAI BARAT	190	37	54,271,410,000	49,056,530,003	90.39%	-	-	190	158	-	100.00%	83.16%	32
5	64	KALIMANTAN TIMUR	6408	KUTAI TIMUR	139	9	46,630,799,000	43,901,424,009	94.15%	-	-	139	127	-	100.00%	91.37%	12
6	64	KALIMANTAN TIMUR	6409	PENAJAM PASER UTARA	30	22	9,889,218,000	9,889,218,000	100.00%	-	-	30	30	-	100.00%	100.00%	-
7	64	KALIMANTAN TIMUR	6411	MAHAKAM ULU	50	1	15,622,051,000	11,876,490,000	76.02%	-	-	48	34	-	96.00%	68.00%	16
				Total	**841**	**246**	**265,843,177,000**	**251,130,096,111**	**94.47%**	**-**	**-**	**839**	**766**	**-**	99.76%	91.08%	**75**

TOTAL: 94,47% tersalur

Tahap I: 99,76%

Tahap II: 91,08%

75 desa belum salur Tahap II

DPMPD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR • 2026

DPMPD
PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR

AGENDA PENGUATAN TA 2027

Prioritas tindak lanjut bersama menuju TA 2027

Hasil rapat teknis diterjemahkan menjadi rencana kerja yang terukur dan dapat dipantau.

1 SEBELUM APB DESA DITETAPKAN



- Sosialisasikan regulasi dan pedoman kabupaten/kota; sinkronkan perencanaan dan penganggaran.

2 SAAT PELAKSANAAN



- Perkuat disiplin transaksi, kelengkapan bukti, pengadaan, pencatatan, dan pengendalian kegiatan.

3 PELAPORAN & TRANSPARANSI



- Tingkatkan ketepatan waktu laporan, konsistensi data, publikasi informasi, dan kualitas pertanggungjawaban.

4 PENGAWASAN & TINDAK LANJUT



- Petakan risiko, selesaikan rekomendasi pemeriksaan, dokumentasikan tindak lanjut, dan cegah masalah berulang.

UKURAN KEBERHASILAN: Regulasi siap • aparatur kompeten • data tertib • rekomendasi ditindaklanjuti • manfaat dirasakan warga

DPMPD
PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR

PESAN KUNCI

DESA YANG KUAT, BERAWAL DARI TATA KELOLA KEUANGAN YANG AMANAH.

Mari perkuat sinergi Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Pemerintah Desa untuk memastikan setiap rupiah anggaran desa memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.



DPMPD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DPMPD
PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR

TERIMA KASIH

Mari Bersama Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Desa yang Tertib, Transparan, Akuntabel, dan Berdampak.

Sinergi dan komitmen kita adalah kunci untuk memastikan setiap rupiah anggaran desa memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

DPMPD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

MEMBANGUN KALTIM, MEMBANGUN DARI DESA